

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- American Association for the International Commission of Jurists, *Siracusa principles on the limitation and derogation provisions in the international covenant on civil and political rights*, New York: American Association for the International Commission of Jurists, 1985.
- Amriani, Nurnaningsih. *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2012.
- Aryani, Dyah, DKK, *Putusan Komisi Informasi dalam Bingkai Hukum Progresif*, Jakarta: Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, 2015.
- Asshiddiqie, Jimly, *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Edwards III, George C. *Implementing Public Policy*, Washington: Congressional Quarterly Press, 1980.
- Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iah di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada 2016.
- Gregory, Maxine, dan Jayne Wilson, *Monitoring And Evaluation*, Washington: CIVICUS, 2018
- Hapiz, M, DKK, *Transformasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia*, Jakarta: Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, 2021.
- Kadji, Yulianto. *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik, Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas*. Gorontalo: UNG Press Gorontalo, 2015.
- Kansil, Christine S T. *Kamus istilah hukum*. Jakarta: Gramedia

- Pustaka, 2009.
- Kementerian Agama, R I. *Al-Qur'anul Karim, Al-Hamid terjemah perkata Transliterasi Latin*. Bandung, PT. Dinamika Cahaya Pustaka, 2019.
- Margono, Suyut. *ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Bogor: PT. Graha Indonesia, 2000.
- Mukti Fajar, N D, dan Yulianto Achmad. *Dualisme penelitian hukum: normatif & empiris*. Pustaka pelajar, 2010.
- Mustofa, M Lutfi. *Monitoring dan evaluasi: konsep dan penerapannya bagi pembinaan kemahasiswaan*. UIN-Maliki Press, 2012.
- Prastowo, Andi, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012
- Rato, Dominikus. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Prenada Media, 2010.
- Sugiyono. *Metode penelitian manajemen*, Bandung: CV. Alfabeta, 2013.
- Syahrani, Riduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Zulpikar, *Memahami Keterbukaan Informasi Publik*, Tangerang: CV. Elba Sejahtera Grup, 2025.

JURNAL/SKRIPSI

- Adiyanta, F C Susila, dan C S Widyastuti. "Hukum Dan Proses Pengambilan Putusan Oleh Hakim: Menelusuri Khasanah Diskursus tentang Teori-Teori Adjudikasi [Theories of Adjudication]." *Administrative Law and Governance Journal* Vol 4 No. 2, 2021.
- Arif Manurul Hidayat, Mohamad, Skripsi: "Implementasi Prinsip-Prinsip Keterbukaan Informasi Publik Di Pemerintahan Provinsi Banten Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14

Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Studi Kasus PPid Perovinsi Banten).” Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2019.

Junanda, Skripsi: "Peran Komisi Informasi Provinsi Banten Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik", Banten: UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018.

Cadith, Juliannes, dan Rina Yulianti. “Membangun Kelembagaan Penyediaan Informasi Publik Desa dalam Rangka Menjamin Penuhan Hak Konstitusional Masyarakat Desa di Kabupaten Serang.” *Jurnal Administrasi Publik* Vol. 13 No. 1, 2022.

Emilia Ferdian Restie, “Penegakan Hukum Terhadap Prinsip Sukarela Dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Melalui Mediasi Di Komisi Informasi Provinsi Banten Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik" (Skripsi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2023)

Mansur, Jumria. “Implementasi Konsep Pelaksanaan Kebijakan Dalam Publik.” *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 6 No. 2, 2021.

Nawawi, Lutfi, Trisna Sonjaya dan Hilman. “Penerapan Keterbukaan Informasi Melalui Monitoring Dan Evaluasi Pada Organisasi Perangkat Daerah di Provinsi Banten,” *Antasena: Governance and Innovation Jurnal* Vol, 2 No. 2, 2024.

Rahmawati, Omah, Skripsi: “Politik Hukum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Sistem Demokrasi Negara Hukum di Indonesia (Studi Di Komisi Informasi Provinsi Banten).” UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2022.

WEBSITE

Kalmanjunior, Komisioner: Peran, Tugas, dan Tantangan dalam Kerangka Hukum dan Tata Kelola, *Pekerja*, diakses pada 08 Mei

2025 <https://pekerja.com/info/komisioner-peran-tugas-dan-tantangan-dalam-kerangka-hukum-dan-tata-kelola/>, Diakses pada 08 Mei 2025, Pukul 12.15 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "Informasi", <https://kbbi.web.id/informasi>, Diakses pada 14 Mei 2025, Pukul 12.15 WIB

Komisi Informasi Provinsi Banten. Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi, <https://komisiinformasi.bantenprov.go.id/read/download-formulir-psi.html>, Diakses pada 18 Agustus 2025.

-----, "Grafik Sengketa", <https://komisiinformasi.bantenprov.go.id/read/grafik-psi/345/Grafik-Sengketa-2024.html>, Diakses Pada 12 Mei 2025, Pukul 14.33 WIB

-----, "Putusan Ajudikasi", <https://komisiinformasi.bantenprov.go.id/id/channel/putusan-ajudikasi.html>, Diakses Pada 12 Mei 2025, Pukul 16.30 WIB.

UNDANG-UNDANG/PERATURAN/LAIN-LAIN

Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang *Monitoring* dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

Surat Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: 002/Kep/KI-Banten/VIII/2024 Tentang Badan Publik Yang di Monitoring dan Evaluasi Tahun 2024.

Surat Keputusan Komisi Informasi Banten Nomor: 009/Kep/KI-Banten/XII/2024 tentang Hasil *Monitoring* dan Evaluasi Badan Publik Tahun 2024

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

United Nations General Assembly, Universal Declaration of Human Rights, 1948.